

STRATEGI KEBIJAKAN MENCEGAH KENAIKAN HARGA BERAS DI INDONESIA

11

Ari Mulianta Ginting*

Abstrak

Peningkatan harga beras terjadi berulang di awal tahun 2024, akibat adanya defisit antara produksi dan konsumsi beras yang berawal dari triwulan IV tahun 2023 dan diproyeksikan hingga triwulan I tahun 2024. Tidak dapat dipungkiri bahwa cuaca menjadi salah satu faktor di samping beberapa faktor lainnya seperti infrastruktur irigasi sawah yang rusak, dan pupuk subsidi yang langka di pasar. DPR RI melalui komisi terkait seperti Komisi IV perlu mendorong Kementerian Pertanian dan Kementerian terkait lainnya agar melaksanakan bauran kebijakan demi mencegah hal ini terjadi berulang, di antaranya mendorong ketersediaan pupuk subsidi di pasar, dan perbaikan irigasi sawah yang rusak. Komisi VI DPR RI juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan impor pada waktu yang tepat dan bukan pada saat panen raya. DPR RI juga diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan. Ketika berbagai bauran kebijakan ini diterapkan maka kenaikan harga beras yang berulang dapat diredam.

Pendahuluan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras secara rata-rata nasional mengalami peningkatan khususnya beras premium. Pada minggu ketiga Februari 2024 harga beras mencapai 14.380 per kilogram (kg) naik 5,29% jika dibandingkan pada bulan Januari dan sebelumnya. Peningkatan harga

beras di Indonesia terjadi di hampir 28 provinsi di 179 kabupaten/kota di provinsi tersebut di atas harga rata-rata nasional (Harga beras meroket, 2024).

Harga beras sudah jauh di atas harga eceran rata-rata tertinggi pemerintah yaitu Rp10.900 - Rp11.800 per kg berdasarkan zonasi untuk beras medium. Kondisi



* Analisis Kebijakan Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: ari.ginting@dpr.go.id.



beras yang terjadi sekarang tidak hanya kenaikan harga akan tetapi juga pasokan beras mengalami penurunan hingga pada beberapa daerah kesulitan mendapatkan beras premium (Tak hanya beras, 2024).

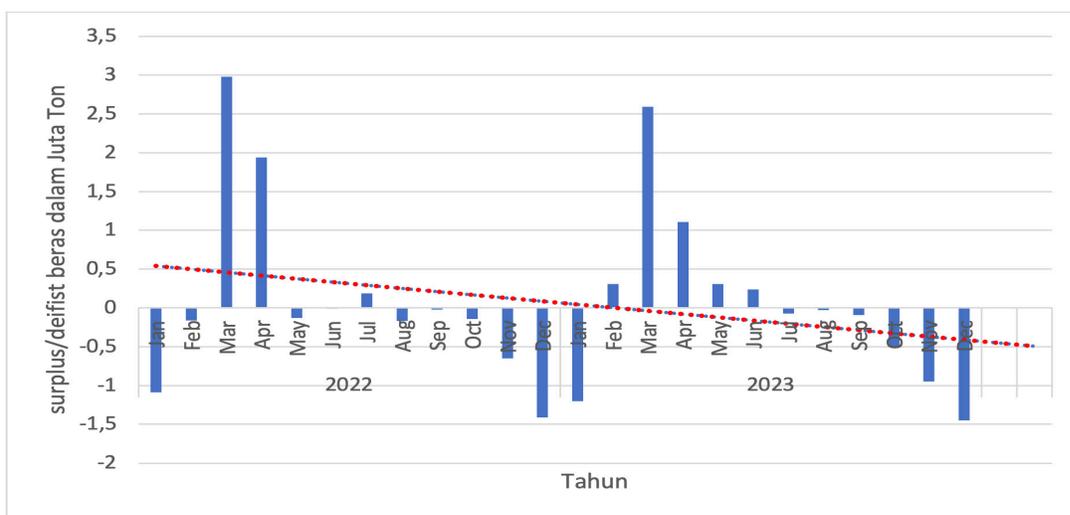
Tulisan ini bertujuan menganalisis persoalan perberasan nasional dengan memberikan gambaran secara umum terkait kondisi beras di Indonesia khususnya penyebab peningkatan harga. Hasil dari analisis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan di Indonesia terkait beras khususnya di Komisi IV dan Komisi VI DPR RI.

Tren Peningkatan Harga Beras di Indonesia

Data BPS berdasarkan rilis laporan pada bulan Februari 2024 terkait inflasi disebutkan bahwa beras menjadi sumber utama peningkatan inflasi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada bulan Januari 2024, komoditas beras masih mengalami inflasi sebesar 0,64% dengan andil sebesar 0,03%.

Secara umum, kenaikan harga beras terjadi di 28 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan harga beras (Indonesia, BPS, 2024).

Surplus atau defisit beras dapat dihitung dengan membandingkan volume produksi beras dengan volume konsumsi beras pada suatu periode tertentu. Data BPS menunjukkan bahwa dari periode Januari 2022 hingga Desember 2023 dapat dilihat (Gambar 1) bahwa pada akhir tahun 2023 khususnya pada triwulan IV yaitu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2023 menunjukkan terjadi defisit beras di Indonesia. Defisit ini menunjukkan bahwa antara konsumsi dan produksi beras di Indonesia tidak seimbang. Jika kita melakukan analisa peramalan sederhana, proyeksi triwulan I tahun 2024 juga masih mengalami defisit beras secara nasional (lihat Gambar 1).



sumber: BPS, 2024 (diolah).

Gambar 1. Perkembangan dan *Forecast* Defisit Produksi Beras Nasional

Dampak defisit beras yang terjadi hingga bulan Februari 2024 terlihat nyata dengan terjadinya peningkatan harga beras secara nasional. Peningkatan harga beras terjadi merata di hampir seluruh Indonesia, seperti contoh harga beras di pasaran wilayah Jawa Barat, harga beras medium berada di *range* harga Rp13.000 hingga Rp15.000 per kg. Angka ini jauh di atas harga eceran tertinggi beras medium yang diatur pemerintah, yaitu sekitar Rp10.900 hingga Rp11.800 per kg berdasarkan zonasi daerah. Peningkatan harga tidak hanya di beras jenis medium, harga beras premium juga menyentuh Rp16.500 per kg. Padahal biasanya harga beras premium harganya sekitar Rp12.000–Rp13.000 per kg (Ashri dan Costa, 2024).

Penulis berpendapat peningkatan harga suatu barang termasuk beras, merupakan dampak dari berlakunya mekanisme pasar atau hukum permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dalam ilmu ekonomi (Parkin, 2020). Ketika permintaan tidak berubah atau stabil, akan tetap terjadi penurunan penawaran atau *supply* beras secara nasional maka yang terjadi adalah kenaikan harga beras seperti sekarang. Kondisi ini jika tidak ditangani secara serius dapat berdampak terhadap harga yang semakin meningkat dan timbulnya kelangkaan beras di pasaran.

Hal ini terbukti dari kondisi di pasar, sebagai contoh di Bandung. *Branch Corporate Communication Alfamart* untuk wilayah Bandung, Jawa Barat Elisa Refila menjelaskan bahwa para pelaku ritel di wilayah Jawa Barat mulai kesulitan memenuhi stok beras premium. Bahkan kelangkaan beras juga terjadi di sentra produsen padi, seperti di

Kabupaten Cirebon. Warga kesulitan mendapatkan beras premium. Kondisi ini sudah seharusnya menjadi *warning alarm* bagi pemerintah untuk dapat melakukan tindakan segera.

Berbagai fenomena iklim yang ditandai dengan kekeringan tersebut menyebabkan hujan terlambat turun di Indonesia. Akhirnya masa tanam yang seharusnya di mulai di bulan Oktober hingga Desember 2023 mundur hingga Januari dan Februari 2024. Dampaknya produksi beras secara nasional mengalami penurunan dan harganya menjadi mahal (Maharso et al., 2024).

Bauran Strategi untuk Mencegah Peningkatan Harga Beras Berulang Kembali Secara Nasional

Penulis berpendapat bahwa tren peningkatan harga beras harus dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan data dari BPS seperti yang sudah dijelaskan pada Gambar 1, peningkatan harga terjadi karena adanya gap antara produksi dengan konsumsi beras secara nasional. Lebih parahnya jika kita melihat tren gap tersebut terus melebar hingga triwulan I tahun 2024. Produksi yang terus menurun berdampak terhadap penawaran beras secara nasional yang menurun. Dampak lanjutan sesuai dengan teori ilmu ekonomi bahwa ketika terjadi penurunan penawaran dan permintaan tetap maka terjadi kenaikan harga beras secara nasional.

Produksi beras yang terus mengalami penurunan salah satunya disebabkan oleh perubahan cuaca. Faktor lain adalah masalah secara struktural. Salah satunya adalah infrastruktur irigasi sawah yang tidak memadai yang menghambat

produksi beras di Indonesia. Kerusakan infrastruktur irigasi menyebabkan terjadi masalah kekurangan pasokan air sehingga ada daerah yang tidak dapat melakukan produksi (Kompas, 2024). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya Komisi IV dapat mendorong Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengidentifikasi kerusakan irigasi sawah di seluruh Indonesia dan sesegera mungkin untuk mencegah kekurangan pasokan air bagi sawah. Pemerintah juga tidak dapat mengandalkan sawah tadah hujan (non-irigasi teknis) yang sangat bergantung kepada curah hujan.

Harga beras dapat turun melalui impor yang dilakukan oleh Pemerintah, namun sering kali impor yang dilakukan justru pada saat waktu yang kurang tepat. Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Profesor Dwi Andreas Santosa, pemerintah sering kali melakukan impor beras pada saat panen raya. Kondisi tersebut menguntungkan konsumen namun mengancam anjloknya harga gabah petani (Ashri dan Costa, 2024). Penulis berpendapat bahwa untuk mencegah kenaikan harga terus berulang, maka DPR RI khususnya Komisi VI untuk dapat mendorong Pemerintah agar dapat melakukan impor tidak pada saat panen raya, akan tetapi pada saat terjadi defisit beras seperti sekarang ini.

Kenaikan harga beras juga disebabkan oleh kenaikan biaya produksi, antara lain penggunaan pupuk non-subsidi oleh petani.

Penggunaan pupuk non-subsidi terpaksa dilakukan oleh petani karena penggunaan pupuk subsidi yang sulit didapatkan dan harganya juga mengalami peningkatan. Petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yang telah diberikan pemerintah. Kelangkaan pupuk bersubsidi ini harusnya dapat diantisipasi pemerintah melalui berbagai instrumen dan perangkat yang dimiliki oleh pemerintah (Maharso et al., 2024). Penulis berpendapat bahwa peran DPR RI khususnya Komisi IV menjadi sangat penting dalam rangka memastikan kepada pemerintah agar pupuk bersubsidi dan sampai kepada petani yang membutuhkan untuk proses tanam.

Untuk mencegah kenaikan harga secara berulang adalah perlunya diversifikasi pangan. Masyarakat memang harus diberikan kesadaran dan sosialisasi yang kongkret terhadap pentingnya diversifikasi pangan. Meningkatkan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan menggantikan beras seperti sorgum dan singkong. Tetapi pengalaman empiris menunjukkan bahwa kebijakan diversifikasi pangan alternatif (pengganti beras) masih belum berhasil secara masif sampai saat ini. DPR RI juga memiliki peran yang strategis untuk mendorong pemerintah dan juga masyarakat dalam pelaksanaan diversifikasi pangan.

Penutup

Tren peningkatan harga beras terjadi berulang pada awal Januari sampai Februari 2024. Berdasarkan data BPS peningkatan harga beras sudah terjadi pada triwulan IV tahun 2023 dan memiliki *forecast* akan terus

meningkat hingga akhir triwulan I tahun 2024. Peningkatan harga beras ini terjadi karena adanya defisit antara produksi dan konsumsi beras di Indonesia.

Untuk mencegah kenaikan harga beras yang berulang perlu beberapa bauran kebijakan yang akurat. DPR RI melalui Komisi IV harus dapat memastikan Kementerian Pertanian dan PUPR untuk memperbaiki irigasi sawah yang rusak pada beberapa sentra produksi beras. Sedangkan Komisi VI dapat mendorong pemerintah melalui Perum Bulog dan instansi lainnya untuk dapat mengimpor beras pada waktu yang tepat guna menutupi (gap) defisit beras nasional. DPR RI perlu terus mendorong pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan melalui diversifikasi pangan pengganti beras, seperti sorgum dan/atau singkong.

Referensi

Ashri, Abdulah Fikri., Costa, Fabio Maria Lopes. (2024, 18 Februari). Lonjakan Harga Beras yang Berulang, Ujian Perdana Calon Presiden Terpilih. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/17/lonjakan-harga-beras-yang-berulang-ujian-perdana-presiden-terpilih>

Harga Beras Terus Meroket, Perlu Langkah lanjutan. (2024, 19 Februari). *Kompas*, hlm. 1.

Indonesia, BPS. (2024). Berita Resmi Statistik 1 Februari 2024. Badan Pusat Statistik.

Maharso, Yohanes., Piri, Ilona Esterina., Antara., Sari, Amelia Rahmina. (2024, 17 Februari). Agar Kenaikan Harga Pangan Tereadam. *Koran Tempo*, hlm. 1.

Parkin, Michael. (2020). *Economics*. Pearson Education Limited.

Tak Hanya Beras, Harga Bahan Pokok Lain Pun Naik. (2024, 20 Februari). *Kompas*, hlm. 1.

Widi, Hendriyo. (2024, 21 Februari). Menggendong Problem Beras. *Kompas*, hlm. 10.